

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARTU TANI DI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG

Nurhasan¹, Suhaerudin², Budi Santoso³, Komir Bastaman⁴

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

Nurhasanalfarisyi74@gmail.com¹; Herumuhammadyahsbg@yahoo.co.id²;
Santosobudi702@yahoo.co.id³; komirbastaman60@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini latar belakang pelaksanaan kebijakan kartu tani yang belum berjalan dengan baik, mulai dari tahapan penerbitan kartu, pelaksanaan sampai dengan proses pendistribusian pupuk tersebut. Sementara dari ketersediaan pupuk dan sumber daya penyuluh berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang akan digarap oleh petani.

Implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Meter dan Horn (Wahab, 2008:79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu desain yang memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan dalam hal ini menganalisis Program Nasional Pemberlakuan Kartu Tani khususnya di kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambarn secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan kartu tani sudah dilakukan sosialisasi melalui UPTD Pertanian dan PPL kepada masyarakat. Tentunya proses ini dapat meningkatkan kinerja kebijakan sehingga masyarakat dapat menerima dengan jelas dan rinci atas kebijakan tersebut. Sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk formal ataupun non formal. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk implementasi suatu kebijakan penting dipenuhi, supaya ada spesialisasi tugas, sehingga petugas fokus pada tupoksinya masing-masing dan hasil yang dicapaipun baik, dan kegiatan atau agenda-agenda yang sudah direncanakan dapat berjalan secara terus menerus, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik. Dalam upaya ini Dinas Pertanian Kabupaten Karawang melaksanakan intervensi spesifik kebijakan pusat, yaitu upaya mencegah agar petani tidak lagi kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Implementor program kartu tani di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang berkaitan dengan SOP manjerial, SOP perencanaan dan SOP pelaksanaan kegiatan dan SOP pelaporan.

Dukungan politik atas kebijakan ini termuat dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang

Kata kunci: implementasi kebijakan, kebijakan kartu tani

ABSTRACT

This research is the background of the implementation of the farmer card policy that has not been going well, starting from the stages of card issuance, implementation to the distribution process of the fertilizer. Meanwhile, the availability of fertilizers and extension resources is inversely proportional to the availability of land to be cultivated by farmers

Policy implementation and the factors that influence the success of an implementation according to Meter and Horn (Wahab, 2008: 79) also suggest several things that can affect the success of an implementation, namely the size and objectives of the policy, resources, communication between organizations, the characteristics of the implementing organization and economic, social and political conditions

The research method used in this research is descriptive qualitative, namely a design that makes it easy for researchers to record, monitor and follow the process of an event or activity in this case analysing the National Program for Enforcement of Farmers' Cards, especially in the Cilamaya Wetan sub-district, Karawang Regency, within a period of time. and then interpreted to answer the research problem. The use of descriptive research methods with a qualitative approach is intended to provide a systematic, factual and accurate description of the Policy Analysis of Farmer Card Enforcement in Cilamaya Wetan District, Karawang Regency, a current condition as well as the relationship between the phenomena investigated

The results of the study indicate that the farmer card policy has been socialized through the UPTD Agriculture and PPL to the community. Of course, this process can improve policy performance so that the public can clearly and in detail accept the policy. The socialization can be in the form of formal or informal. The availability of human resources and other resources needed for the implementation of an important policy is met, so that there is specialization of tasks, so that officers focus on their respective duties and the results achieved are good, and activities or agendas that have been planned can run continuously. , so that the policy objectives can be achieved properly. In this effort, the Department of Agriculture of the Karawang Regency implements specific interventions for central policies, namely efforts to prevent farmers from having difficulties in meeting the needs of subsidized fertilizers. The implementor of the farmer card program at the Karawang Regency Agriculture Service has worked in accordance with the applicable SOP. Standard Operating Procedures (SOPs) in the Karawang Regency Agriculture Service relate to managerial SOPs, planning SOPs and SOPs for implementing activities and reporting SOPs. Political support for this policy is contained in the Karawang Regent Regulation Number 63 of 2018 concerning Karawang Regency Irrigation Management Institutions

Keywords: policy implementation, farmer card policy

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Penelitian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, dalam Perpres tersebut menjelaskan bahwa Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK. Pengawasan mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.

Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi, ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah melalui Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan telah berupaya dengan berbagai cara agar persoalan pupuk bersubsidi dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi harus memenuhi Prinsip 6 Tepat, seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Enam prinsip penyaluran pupuk bersubsidi adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Diinisiasi mulai tahun 2016, pemerintah melalui Menteri Pertanian membuat kebijakan terkait pupuk bersubsidi yaitu dengan Program Kartu Tani yang awal peluncurannya diwilayah jawa, pelaksanaanya

dilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2017 kartu tani baru diterapkan di Pulau Jawa (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian Indonesia (Setiawan & Prajanti, 2016). Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan, dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata)

Tabel 1

Data Luas Areal Pertanian dan Penerima Kartu Tani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

No	Desa	Luas Areal Pertanian	Jumlah penerima
1.	Cilamaya	250 Ha	205
2.	Mekarmaya	326 Ha	280
3.	Muara	766 Ha	469
4.	Muara Baru	698 Ha	482
5.	Tegalwaru	339 Ha	291
6.	Tegalsari	123 Ha	167
7.	Sukatani	625 Ha	400
8.	Sukakerta	493 Ha	360
9.	Rawagempol Wetan	380 Ha	304
10.	Rawagempol Kulon	433 Ha	298
11.	Cikalong	306 Ha	258
12.	Cikarang	276 Ha	236
Jumlah		5.015 Ha	3.761

Tabel 2
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tingkat
Kios Kecamatan Cilamaya wetan
Kabupaten Karawang

Poktan RDKK Desa	Luas Lahan Rencana Tanam (Ha)	Jumlah Kebutuhan Urea (Kg)	Jumlah Kebutuhan SP 36 (Kg)
Cilamaya	250	62.500	37.500
Mekarmaya	326	81.500	48.900
Muara	765	191.250	114.750
Muara Baru	698	172.250	103.350
Tegalwaru	339	84.750	50.850
Tegalsari	123	30.750	18.450
Sukatani	625	156.250	93.750
Sukakarta	493	123.250	73.950
Rawagempol Wetan	380	95.000	57.000
Rawagempol Kulon	433	108.250	64.950
Cikarang	276	69.000	41.400
Cikalong	306	76.500	45.900
Jumlah	5.015	1.253.750	752.250

Lanjutan.....

Poktan RDKK Desa	Jumlah Kebutuhan ZA (Kg)	Jumlah Kebutuhan NPK (Kg)
Cilamaya	25.000	37.500
Mekarmaya	32.600	48.900
Muara	76.500	114.750
Muara Baru	69.800	103.350
Tegalwaru	33.900	50.850
Tegalsari	12.300	18.450
Sukatani	62.500	93.750
Sukakarta	49.300	73.950
Rawagempol Wetan	38.000	57.000
Rawagempol Kulon	43.300	64.950
Cikarang	27.600	41.400
Cikalong	30.600	45.900
Jumlah	501.500	752.250

Berdasarkan table di atas, jelas bahwa setiap desa mempunyai kebutuhan yang bervariasi, hal ini disesuaikan dengan luas areal yang tersedia. Namun, pada kenyataannya pada tingkat pemenuhan ada keterbatasan.

Ketersediaan pupuk subsidi di kios semakin sedikit, pembelian pupuk subsidi dibatasi hanya bagi petani yang memiliki Kartu Tani. Kuota kartu

tani dibandingkan dengan tingkat kepemilikan sawah menunjukkan ratusan petani pemilik sawah yang akhirnya tidak bisa mendapat kartu tani. Artinya pupuk non subsidi jadi pilihan agar tanaman padinya tumbuh optimal. Kuota pupuk subsidi masih tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Jatah pupuk subsidi masih dibawah kebutuhan petani karena rata rata subsidi yang diberikan perhektar adalah 200 Kilogram

Kebijakan pemerintah belum berpihak kepada para petani. Padahal Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan salah satu dari 30 Kecamatan di Kabupaten Karawang yang memiliki 12 Desa, areal dari masing masing desa rata rata 50 % lebih didominasi oleh pertanian/persawahan, sebagian besar penduduk/masyarakatnya berprofesi sebagai petani, baik petani pemilik lahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut Mengapa kebijakan pemberlakuan kartu tani di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang belum berjalan secara efektif?

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan juga terkait sebuah kewenangan, namun ia memiliki ruang lingkup atau keterbatasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Secara etimologis, kebijakan yang berakar dari kata bijak itu memiliki makna yang cenderung positif, sehingga tidak ada kebijakan yang dimaksud untuk membawa sesuatu yang negatif, meskipun dalam prakteknya bias saja demikian.

Kebijakan menurut pendapat Friedrich (Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sementara itu, kebijakan merupakan tahapan lanjutan atas formulasi kebijakan yang sudah disepakati pada elit politik (Bastaman, 2020; Hirawan et al., 2018; Peirisal, 2015)

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat

Implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Meter dan Horn (Wahab, 2008:79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan. Hal ini diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
2. Sumber-sumber kebijakan
Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksana. Menurut Subarsono (2008:7) kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
5. Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu desain yang memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan dalam hal ini menganalisis Program Nasional Pemberlakuan Kartu Tani khususnya di kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

Digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambarnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, suatu kondisi pada masa sekarang serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki.

HASIL PENELITIAN

4.1 Standar dan sasaran kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Sebuah kebijakan bias jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Sebuah kebijakan bisa gagal dalam pelaksanaannya jika mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Kebijakan kartu tani sudah dilakukan sosialisasi melalui UPTD Pertanian dan PPL kepada masyarakat. Tentunya proses ini dapat meningkatkan kinerja kebijakan sehingga masyarakat dapat menerima dengan jelas dan rinci atas kebijakan tersebut. Sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk formal ataupun non formal. Sosialisasi ini dapat menentukan keberhasilan dari kebijakan tani ini. Dari sisi norma, kebijakan ini sudah didukung dengan kuat atas peraturan-peraturan terkait. Dari segi sasaran, siapa-siapa saja yang berhak menerima manfaat secara langsung dari kebijakan tersebut. Hal ini perlu mendapatkan konsistensi yang kuat atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

4.2 Sumber daya kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975:463) dalam Subarsono (2015:100) sebuah kebijakan perlu didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Walau isi kebijakan

sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka sebuah kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, bahwa pelaksana program pertanian di UPTD Pertanian Kecamatan Cilamaya Wetan jumlahnya sangat terbatas, sehingga kegiatan yang mestinya dilakukan oleh petugas di tiap desa banyak terkendala waktu karena minimnya tenaga ahli sehingga menyebabkan belum terlaksananya pelayanan program dengan efektif dan maksimal. Untuk memenuhi kewajibannya, PPL merangkap tugas di desa yang tidak ada penyuluh pertaniannya. Dengan kata lain, ketika suatu organisasi mempunyai kekurangan dalam sisi sumber daya manusia maka secara tidak langsung menyatakan masih kurang untuk memenuhi kecepatan tugas untuk mengimplementasikan program.

Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk implementasi suatu kebijakan penting dipenuhi, supaya ada spesialisasi tugas, sehingga petugas fokus pada tup

oksinya masing-masing dan hasil yang dicapaipun baik, dan kegiatan atau agenda-agenda yang sudah direncanakan dapat berjalan secara terus menerus, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik.

4.3 Hubungan Antar Organisasi

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program (Subarsono, 2015:100). Komunikasi antar badan pelaksana harus ditetapkan sebagai acuan misalnya sering dilaksanakannya rapat-rapat rutin secara berkala dengan tempat dan

waktunya yang telah ditetapkan agar dapat mendukung komunikasi organisasi antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan dengan kelompok sasaran yang mampu memahami serta bertanggungjawab atas program yang dilaksanakan.

Kebijakan pemberlakuan kartu tani di wilayah Kabupaten Karawang, merupakan sebuah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk mensukseskan program kartu tani. Dalam upaya ini Dinas Pertanian Kabupaten Karawang melaksanakan intervensi spesifik kebijakan pusat, yaitu upaya mencegah agar petani tidak lagi kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, sementara OPD lain dan UPTD Pertanian Tingkat Kecamatan melakukan intervensi sensitif yaitu upaya mengurangi masalah yang terjadi di masyarakat terutama dalam hal pembuatan kartu tani.

Komunikasi antar dinas terkait dan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari tugas maupun kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Disamping itu komunikasi antar organisasi juga dapat mempermudah proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, prospek kebijakan pemberlakuan kartu tani yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Metter dan Horn, dalam Widodo 1974) Disamping itu koordinasi merupakan mekanisme ampuh dalam kesuksesan sebuah kebijakan. Semakin baik komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2015:101) Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi keberhasilan sebuah program. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung organisasi yang dapat mendukung dari struktur (sumber daya) organisasi, nilai-nilai (budaya) yang berkembang dalam organisasi, hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalam birokrasi. Pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksanaan kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Selain itu cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Implementor program kartu tani di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang berkaitan dengan SOP manjerial, SOP perencanaan dan SOP pelaksanaan kegiatan dan SOP pelaporan.

4.5 Dimensi Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan sebuah kebijakan publik. Lingkungan ekonomi,

sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja kebijakan. Menilai keberhasilan kinerja adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja kebijakan. Oleh karena itu upaya keberhasilan kebijakan publik mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Menurut pendapat Webster (Putra, 2001) mengatakan bahwa Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Pada sisi lain Metter dan Horn (1975) dalam Rusli (2015:106) mengatakan bahwa: *“policy implementation encompasses those action by public and privat individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and subjectives sert forth in prior policy decisions.”* Makna yang bias ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan. Pada prinsipnya penerapan sebuah kebijakan tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan namun juga melengkapi tindakan-tindakan atau

perilaku individu dan kelompok, pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial dan ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian pelaksanaan sebuah kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari kebijakan itu

Dari pihak petani, hal-hal yang menyebabkan pupuk subsidi yaitu factor ekonomi yang memang masih menjadi hal yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Apalagi status petani penggarap, yang tidak memiliki lahan secara mandiri dan mengandalkan hasil di kemudian hari. Tidak sedikit yang terjerat dengan pinjaman-pinjaman yang memberatkan, karena himpitan kebutuhan hidup yang kurang diperhatikan pemerintah.

Faktor politik lebih kepada dukungan elit politik terhadap Kebijakan ini. Bupati Karawang berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Karawang tetap menjadi daerah lumbung padi dan persoalan pupuk akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang dimana Kepala Dinas Pertanian mempunyai wewenang dan tanggung jawab: memberikan masukan (secara teknis) dalam penyusunan kebijakan, pedoman dalam bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian di Kabupaten Karawang

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Standar dalam menentukan sasaran kebijakan dan sosialisasi yang dinilai sudah cukup baik namun perlu adanya penguatan komitmen dari para pelaksana kebijakan yang harus diselaraskan dengan keadaan kelompok sasaran.
2. Ketersediaan tenaga ahli pertanian belum sepenuhnya terpenuhi, ini dilihat dari hasil analisis penelitian, jumlah sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi ahli pertanian dari kebutuhan minimal 12 orang hanya terpenuhi 8 orang saja, dengan pembagian tugas satu orang satu desa, dengan keterbatasan tenaga ahli pertanian ada petugas yang melayani 2 desa.
3. Koordinasi konvergensi dan kolaborasi yang terjadi antar lembaga terkait belum berjalan dengan baik, Kurangnya pemahaman bahwa kebijakan pemberlakuan kartu tani adalah program nasional dan merupakan tanggungjawab bersama. Komunikasi antar organisasi yang terjalin saat ini belum efektif sehingga kebijakan pemberlakuan kartu tani pelaksanaannya belum efektif juga
4. Pemahaman para implementor terhadap *standard operational procedures* belum optimal, dibuktikan dengan masih adanya petugas yang tidak disiplin dalam menjalankan perannya. Para petugas dilapangan terkesan yang penting melaksanakan kewajibannya, tanpa adanya niatan untuk lebih meningkatkan kinerja, hal ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat petani yang belum memiliki kartu tani.
5. Kondisi eksternal dalam pelaksanaan kebijakan ini belum bisa bersinergi secara maksimal. Kebijakan ini

dipengaruhi secara besar oleh faktor ekonomi, sampai dengan saat ini permasalahan ekonomi para petani di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan belum tertangani dengan baik sehingga dapat mempengaruhi pada keberhasilan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Disamping itu dengan SDM petani yang hanya rata-rata berpendidikan sekolah dasar itu pun tidak tamat, maka sulit untuk dapat mencerna apa yang mereka harus lakukan. Secara politis, kepedulian para pemegang kendali kebijakan kurang bersinergi karena masih saling tumpang tindih sistem kerjanya.

6. Sikap kerja yang dimiliki dan ditunjukkan oleh para petugas dalam kaitannya dengan kebijakan pemberlakuan kartu tani belum efektif, hanya sebatas laporan yang diperoleh, tanpa ada upaya lebih konkret untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat petani yang notabene adalah masyarakat awam yang pekerjaan sehari-harinya tidak jauh dari antara rumah dan ladang/sawah.

5.2 Saran

1. Dibutuhkan kreativitas dan dorongan yang kuat dari pihak Dinas Pertanian sesuai dengan tupoksinya sebagai penanggungjawab program untuk percepatan pelaksanaan program kartu tani, seperti penyediaan sarana IT dan SDM yang cukup dalam hal input dan validasi data petani dan e-RDKK, membuat *back up* fungsi kecamatan dalam hal *inputing date*, serta menginisiasi *MoU* dengan pihak bank, dukcapil, dan kios-kios penyalur
2. Perlu pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan pendistribusian pupuk bersubsidi. Pembentukan perangkat

pengawasan serta mekanisme pemantauan dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008.

3. Mengaktifkan dan mengevaluasi kembali KP3 (Kelompok Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat pusat, KP3 tingkat Provinsi, dan KP3 tingkat Kabupaten/Kota).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta
- Arikunto. S. 2002. *Prosedur penelitian* (suatu pendekatan praktek). Jakarta Rineka Cipta.
- Budiman. Rusli, 2015. *Kebijakan Publik* (Membangun Pelayanan Publik). CV. Adoya Mitra Sejahtera Bandung.
- Dunn. William. N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Gadjah Mada University Press).
- Moch. Nazir, 3003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo 1974. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bayu Media

Dokumen dan Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang

Journal, Skripsi Tesis dan Disertasi

Bastaman, K. (2020). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.736>

Hirawan, Z., Muhtar, E. A., Sumaryana, A., & Adiwisastra, J. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).

Peirisal, T. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Peruntukan Industri Di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8, 1–18. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIA/article/view/474>